



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2020, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada 6 April 2020 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, Januari 2021
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

NIP 19680830 198903 1 001

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2020, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada 6 April 2020 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, Januari 2021
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Ttd.

Agus Khotib
NIP 19680830 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	6
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	6
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT.....	20
A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra).....	20
B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2020 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

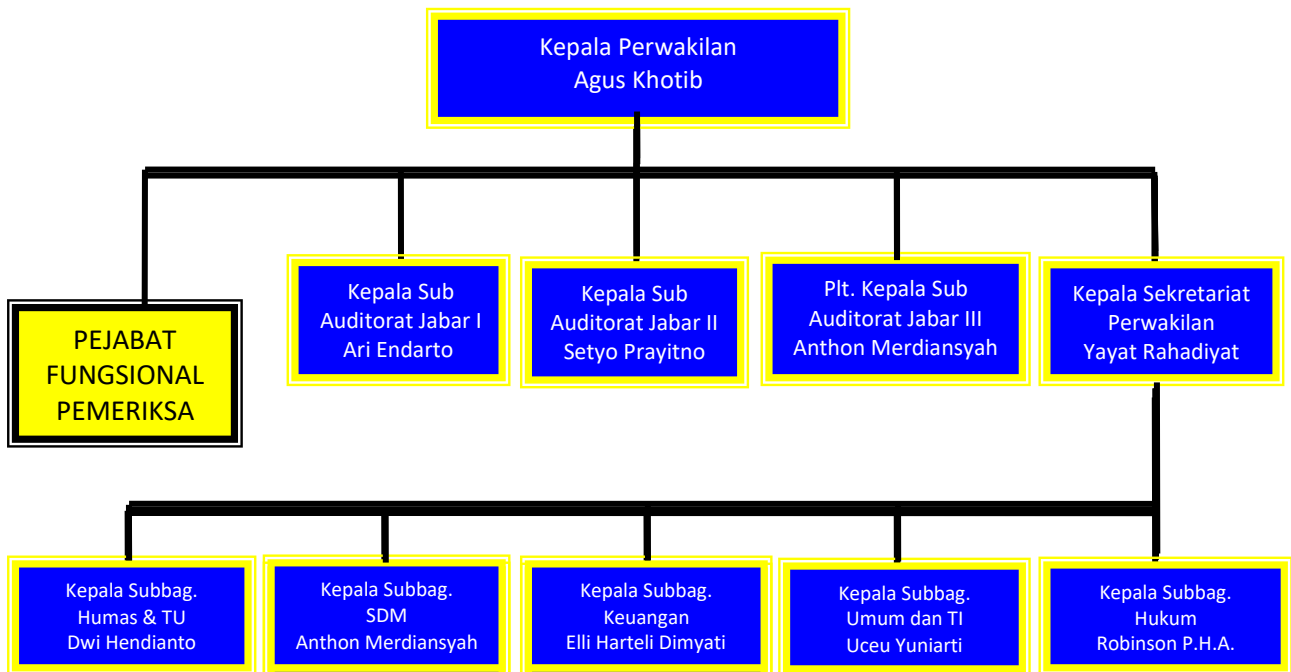
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Jawa Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Subauditorat Jawa Barat I

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Subauditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Subauditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulan Desember 2020 berjumlah 184 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat (1 Plt Kasubaud dari Kasubbag SDM), 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 124 orang pemeriksa dan 46 orang staf penunjang pendukung (Sekretariat) dan 29 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 sebesar Rp41.518.191.000,00. Namun karena adanya kebutuhan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, dan akibat perubahan status dan komposisi pegawai, maka pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan Pagu Anggaran sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor S-2586/WPB.13/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Pemuktahiran Data POK Revisi ke-8 (450799) Pagu Anggaran TA 2020 menjadi Rp40.771.604.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.950.787.084,00 atau 95,46% dari total anggaran.

Alokasi pagu anggaran tersebut terdistribusi pada empat layanan, yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, (2) Layanan Sekretariat Perwakilan, (3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan (4) Layanan Perkantoran. Secara ringkas, perbandingan pagu dan penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Revisi ke-8 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	20.255.628.000,00	19.993.958.000,00	18.365.471.698,00	91,86
	Sekretariat Perwakilan	1.408.776.000,00	1.374.581.000,00	1.365.141.008,00	99,31
	Sarana dan Prasarana Internal	1.193.538.000,00	1.504.443.000,00	1.503.303.200,00	99,92

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Revisi ke-8 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perkantoran	18.660.249.000,00	17.898.622.000,00	17.716.871.178,00	98,98
	Total DIPA 2020	41.518.191.000,00	40.771.604.000,00	38.950.787.084,00	95,46

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi : "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu :

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:

SS 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

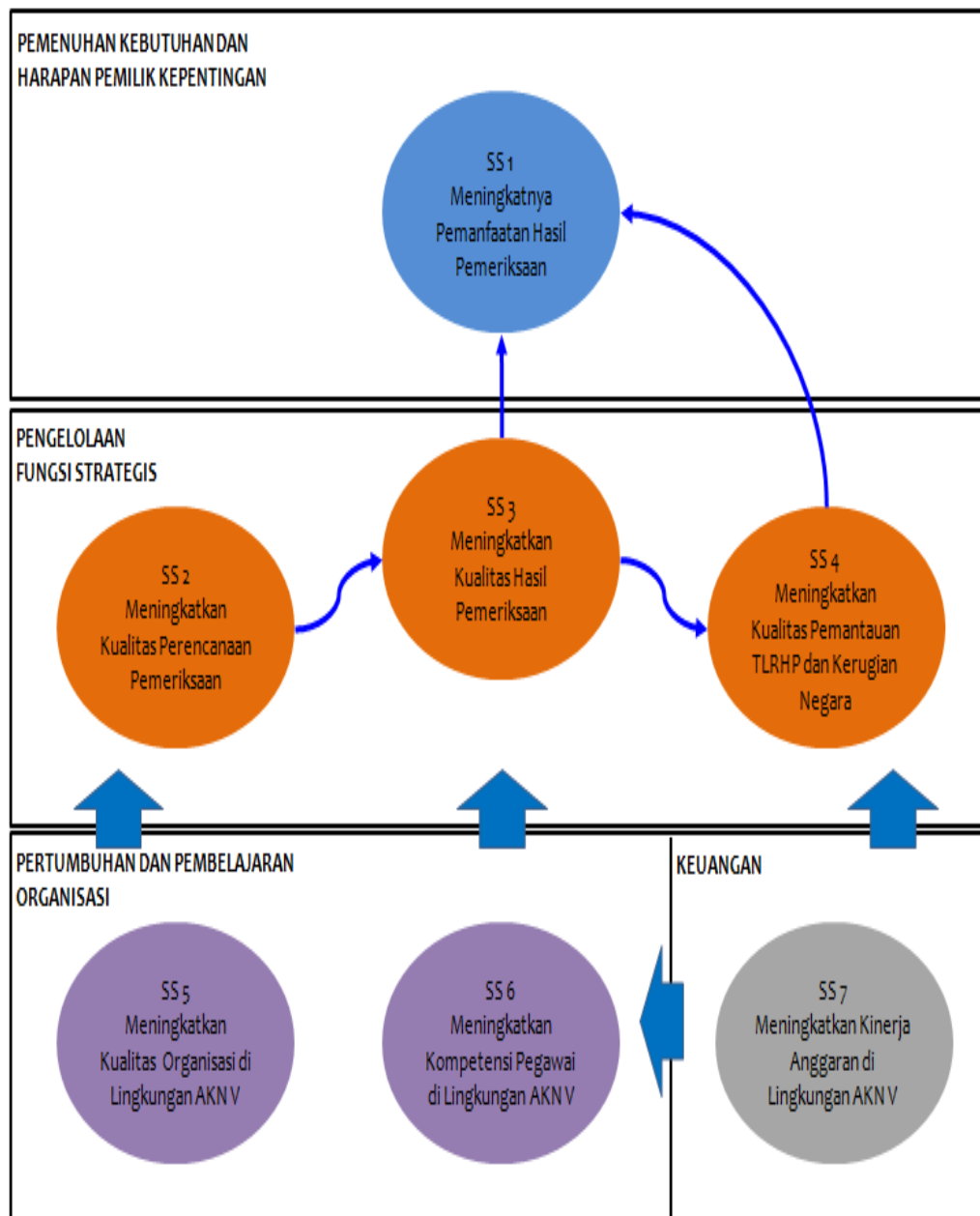
Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

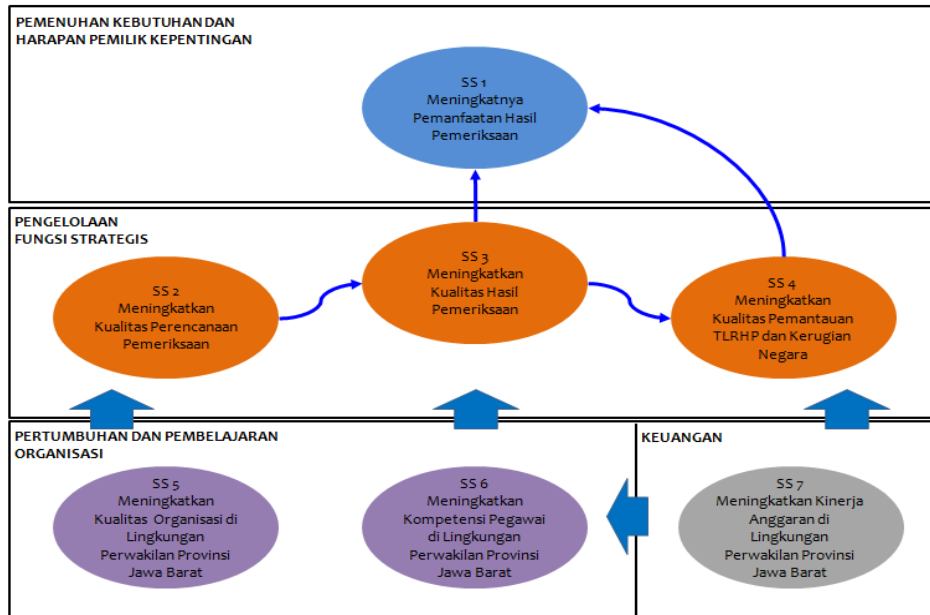
Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan **Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat**. Peta strategis tersebut merupakan turunan dari **Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V** dan pendukung pencapaian sasaran strategis AKN V. Berikut adalah **Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V** dan **Peta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat** :



Gambar – Peta Strategi

2.1

Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK



Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalam mewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS	Indikator Kinerja	
SS 1	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
	1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
SS 2	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP
	2.3	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP

SS	Indikator Kinerja	
SS 3	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
SS 4	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
	4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
SS 5	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice
	5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
SS 6	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
	6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
SS 7	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%
	IKU 2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%
	IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	16%	17%	18%	20%
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A
	IKU 2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0	0	0	0
	IKU 4. Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 7. Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada 6 April 2020. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, yaitu :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja, serta Anggaran Tahun 2020
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp41.518.191.000,00	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp20.255.628.000,00	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp21.262.563.000,00	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020, yang menetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Target 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	70%	100%	Desember	Mengumpulkan dan mendokumentasikan Form QC dan QA dari Tim Pemeriksaan.
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0	100%	100%	100%	Desember	Penyusunan RKP yang disesuaikan kebutuhan dan melaksanakan reviu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas LK, Kinerja dan DTT sesuai harapan penugasan yang

No.	Sasaran Strategis	Target 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								tertuang dalam program pemeriksaan (P2)
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Pembahasan PTLRHP pada bulan Juli dan Bulan Desember 2020 dengan 28 Entitas (Inspektorat) dan Input pada aplikasi SIPTL
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sesuai arahan AKN V dan RKP Tahun 2020
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai RKP Tahun 2020
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	0	0	0	5,00	Desember	Pengarahan Kepala Perwakilan pada Persiapan Pemeriksaan LKPD, Kinerja dan PDTT. Survei dilaksanakan oleh PSMK
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai jadwal dan sesuai format dan masukan dari hasil Evaluasi Itama pada tahun sebelumnya
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Melakukan monitoring pemantauan secara berkala (per Triwulan) atas penggunaan layanan TI

No.	Sasaran Strategis	Target 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	-	100%	Desember	<i>Best Practice</i> dan Replikasi <i>Best Practice</i> disusun pada bulan September – Oktober 2019. Untuk Knowledge Manajemen diusulkan 1 kegiatan
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	3,80	Desember	Survei dilaksanakan oleh PSMK
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	40%	75%	100%	Desember	Untuk diklat di perwakilan rencananya akan dilaksanakan 2 Diklat, yaitu 1 Diklat Teknis Pemeriksaan dan 1 Diklat Non Pemeriksa
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	Desember	Monitoring anggaran dan realisasi anggaran setiap bulan, serta menyampaikan Laporan Realisasi DIPA kepada Biro Keuangan setiap bulannya.

Rencana kegiatan dalam Pencapaian Kinerja secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
1	Pemenuhan Pengendalian dan Mutu Pemerolehan Keyakinan dan Mutu Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan reviu berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (<i>quality control/QC</i>) pada seluruh Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan DTT sesuai standar dan terdokumentasi; Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan atas LKPD, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan DTT dari pemeriksa kepada Kepala Subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/ PSP) setelah dilakukan <i>peer review</i> antara tim pemeriksa dan di-reviu oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance/QA</i>. 	Pelaksanaan pemeriksaan menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020.

Indikator Kinerja Utama	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
		<p>Kegiatan ini dilaksanakan untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan, yaitu:</p> <p>Semester I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Juni 2020); 2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28 entitas (setelah Pemeriksaan Pendahuluan/Interim LKPD). <p>Semester II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 10 entitas. 2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 6 entitas.
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rewiu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2019 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2). 2. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan simpulan. <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rewiu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas LKPD TA 2019 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2) 2. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan opini. <p>Triwulan III:</p> <p>Melaksanakan rewiu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2).</p> <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rewiu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2)

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
		2. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan simpulan/rekomendasi.	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<p>1. Pemantauan TLRHP pada Semester I 2020, dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 5 hari, dilaksanakan secara online</p> <p>2. Pemantauan TLRHP pada Semester II 2020, dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 5 hari dilaksanakan secara online oleh Tim</p> <p>Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester I dan II Tahun 2020</p> <p>1. Memetakan status 1, 2, 3 dan 4 TLRHP, terutama apabila persentase dibawah 75%</p> <p>2. Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas</p> <p>3. Melakukan <i>dual process</i> TLRHP melalui aplikasi SIPTL dan secara manual sebagai <i>backup data</i></p>	Menyesuaikan juga dengan penginputan dalam SIPTL
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	<p>Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sesuai arahan AKN V dan RKP Tahun 2020, pada semester II Tahun 2020, yaitu:</p> <p>1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19</p> <p>2. Pemeriksaan Kinerja ata Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan</p>	Revisi RKP pada Semester II sesuai arahan dan tematik AKN V dan AKN VI
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	<p>1. Berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat;</p> <p>2. Permintaan PKN dan Pemeriksaan Investigatif diarahkan ke Auditorat Utama Investigasi sesuai kewenangannya.</p>	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sesuai arahan AKN V dan RKP Tahun 2020, pada semester II Tahun 2020.	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveyor	oleh Dit. PSMK

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
8	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil penilaian/evaluasi oleh Itama atas Laporan Kinerja, diterima satker pada bulan Agustus atau September	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai memanfaatkan update data pribadi, cuti, kehadiran, dll data kepegawaian melalui SISDM; 2. Penggunaan Presensi online melalui aplikasi kelolatugas.bpk.go.id 3. Penggunaan email bpk.go.id dan aplikasi persuratan 3.0 untuk pelaksanaan tugas sehari-hari; 4. Penggunaan aplikasi SMP utk menginput ST Pemeriksaan, LHP, TLRHP dan LHPT Runeg; 5. Penggunaan aplikasi SiAP LK dan SIPTL; 6. Pemanfaatan Portal Perwakilan sebagai penyimpanan arsip LHP, DEP, TLRHP dan LHPT Runeg; 7. Penggunaan aplikasi Prisma dan Prisma SKP utk validasi kinerja satker dan penilaian/penyusunan skp pegawai 8. Mengupdate berita ataupun informasi lainnya pada website perwakilan. 	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun <i>best practice</i> yang sudah ada di Perwakilan sesuai format/pedoman yang telah ditetapkan dan akan disampaikan kepada Dit. PSMK sebagai usulan <i>best practice</i>, yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Talkshow BPK Jabar Melalui TV/Radio; 2. Melaksanakan implementasi/penerapan replikasi <i>best practice</i>, yaitu "Pemanfaatan Layanan Pojok Berita Untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan" BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menjadi "Layanan Pojok Berita Media pada Website BPK Perwakilan".; 3. Melaksanakan Knowledge Manajemen yaitu Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2019 dan Diseminasi kepada Pemeriksa terkait pedoman pemeriksaan. 	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveyor	oleh Dit. PSMK
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	<p>Untuk memenuhi JP Pemeriksa dan Pegawai Non Pemeriksa, akan dilaksanakan 2 (dua) Diklat Teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Teknis dalam rangka persiapan LKPD pada bulan Januari atau Februari 2020; 2. Diklat Kesekretariatan pada bulan Oktober atau November 2020. 	Anggaran dari Badan Diklat

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
13	Tingkat Kinerja Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen penganggaran dan pemantau pada setiap bulan; 2. Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada setiap bulan; 3. Menyusun laporan keuangan tahunan; 4. Menyusun laporan kegiatan pelaksana pada setiap bulan; 5. Menyusun laporan realisasi DIPA, laporan Target Penyelesaian Keluaran, dan laporan Kemajuan Paket Pengadaan pada setiap bulan. 	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra)

Dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun, tahun 2016 s.d. tahun 2020 banyak perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Satker berupa penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Perubahan penambahan IKU ini merupakan format/bentuk (*template*) IKU yang diberikan oleh Dit. PSMK kepada seluruh satker Perwakilan.

Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memandang perlu dilakukannya perubahan/revisi atas Renstra Satker tidak hanya untuk Perwakilan Jawa Barat, namun juga untuk seluruh satker agar dilakukan perubahan/revisi atas Renstra. Perubahan atas Renstra dimaksudkan agar Renstra yang sudah ada dapat mengakomodir dan sejalan dengan perkembangan dan perubahan pada Perjanjian Kinerja BPK secara keseluruhan.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berdasarkan hasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2020 adalah **98,66**. Skor kinerja Tahun 2020 ini menunjukkan sedikit penurunan skor sebanyak 0,61 poin jika dibandingkan skor Tahun 2019 sebesar 99,27. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang berbeda dengan IKU Tahun 2019, dengan format yang lebih sederhana;
2. sebanyak 6 (enam) IKU yang melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;
3. sebanyak 3 (tiga) IKU yang mencapai target yang ditentukan dengan skor kinerja 100; dan
4. sebanyak 4 (empat) IKU tidak mencapai target yang ditentukan dengan skor <100 (77,68 s.d. 97,77).

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat				98,66
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	77,68%	77,68
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,62%	100,83
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	100,75
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,61	92,20
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	89,09	103,59
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,10%	104,32
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125,00%	105
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,59	94,47
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,77%	97,77
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	88,22%	101,40

Capaian tersebut ada peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang tetap konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil *QA* dan *QC* merupakan pemenuhan *QC* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *QA* dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Realisasi Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP, sampai dengan Triwulan IV atau Semester II adalah 77,68% dengan skor 77,68. Realisasi tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian tersebut menurun dari Tahun sebelumnya, yaitu 100% dengan skor 100.

Walaupun pemenuhan QC dan QA sudah sebesar 100% untuk setiap kegiatan pemeriksaan, namun berdasarkan evaluasi Dit EPP untuk tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP yang diterbitkan masih banyak catatan, khususnya atas LHP LKPD TA 2019. Adapun hasil hasil evaluasi Dit. EPP atas 28 LHP LKPD TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tingkat Konsistensi dan Tingkat Akurasi 100% : 7 LHP
- b. Tingkat Konsistensi 100% dan Tingkat Akurasi 0% : 15 LHP
- c. Tingkat Konsistensi 0% dan Tingkat Akurasi 100% : 2 LHP
- d. Tingkat Konsistensi dan Tingkat Akurasi 0% : 4 LHP

Perkembangan capaian IKU 1 atau sebelumnya IK 2.1.1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU 1 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	77,68% dan 77,68
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%		100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	-

Perbandingan realisasi IKU 1 atau sebelumnya IK 2.1.1 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	77,68%
Pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> dan <i>Quality Assurance (QA)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	-

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp17.884.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.711.635.487,00 atau 93,44%.

2. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 100% dengan skor 100. Capaian ini sesuai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan capaian IKU 2 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 2 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100% dan 100

Perbandingan realisasi IKU 2 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 2, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp17.884.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.711.635.487,00 atau 93,44%.

3. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

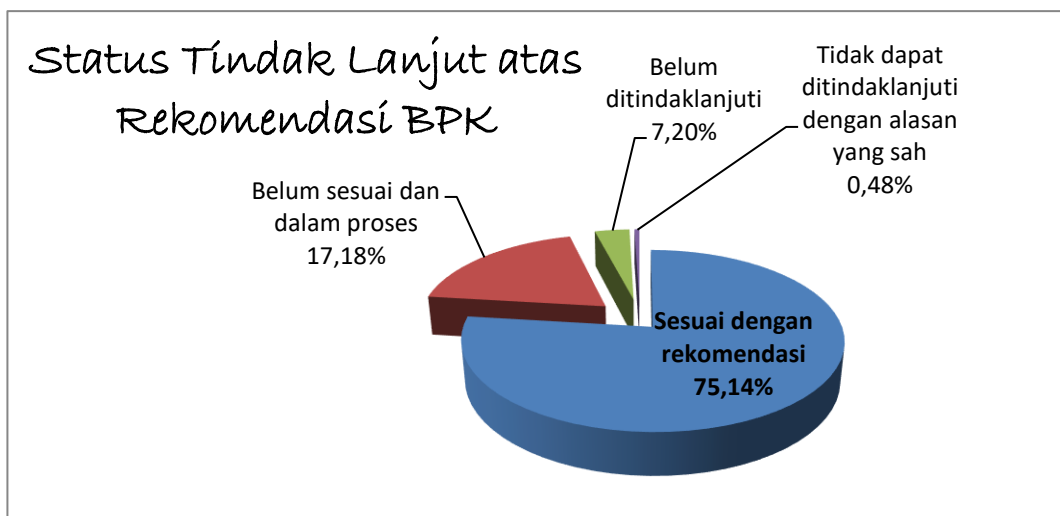
Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

**Tabel 3.4. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti
(sama dengan Data EPP yang dipergunakan dalam IHPS)**

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	18.303	75,14%
2	Belum sesuai dan dalam proses	4.185	17,18%
3	Belum ditindaklanjuti	1.754	7,20%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	118	0,48%
	Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	24.360	100,00%



Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Pencapaian atas IKU 3 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2020 mencapai 75,62% dari 75% target yang ditetapkan dengan skor 100,83.

Perkembangan capaian IKU 3 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 3 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	65%	75%	75%	60,17% dan 100,29	61,23% dan 94,20	68,50% dan 105	77,42% dan 103,22	75,62% dan 100,83

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yaitu sebesar 77,42%, namun masih melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 75%, sehingga jika dibandingkan skor tahun 2020 dengan capaian skor tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Peningkatan capaian melebihi target tersebut disebabkan, oleh karena di tahun 2020, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya persuasif kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada setiap semester dengan mengundang Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Jawa Barat ke Kantor Perwakilan serta beberapa upaya perbaikan melalui pihak Inspektorat Daerah.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mendorong peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan mengadakan acara Rapat Pemantauan Tindak Lanjut di Kantor Perwakilan, dengan mengundang pihak Inspektorat Pemda, yang dilaksanakan selama setiap semester, yaitu dilaksanakan pada:

- a. Rapat PTLRHP Semester I dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat yang dilakukan secara online oleh tim dengan memanfaatkan aplikasi SIPTL
- b. Rapat PTLRHP Semester II dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat yang dilakukan secara online oleh tim dengan memanfaatkan aplikasi SIPTL

Selain itu, perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 dan disesuaikan dengan target adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	60%	65%	65%	75%	75%	60,17 %	61,23 %	68,50 %	77,42 %	75,62 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 3 pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp355.223.000,00 dengan realisasi sebesar Rp199.563.180,00 atau 56,18%.

4. IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 100,75% dengan skor 100,75. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2020 di Semester II, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ikut terlibat dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu 4 (empat) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan 2 (dua) Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Garut;
- d. Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Depok;
- e. Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- f. Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi Covid-19 bidang Kesehatan pada Pemerintah Kota Bogor.

Perkembangan capaian IKU 4 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 4 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100,75% dan 100,75

Perbandingan realisasi IKU 4 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100,75%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 4, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp1.227.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.152.558.863,00 atau 93,90%.

5. IKU 5 – Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Untuk tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat hanya menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak atau pemangku kepentingan yang meminta pemenuhan pemeriksaan khususnya permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atau permintaan Pemeriksaan Investigasi (PI). Karena untuk semua permintaan PKN dan permintaan PI, sejak Tahun 2018 sudah dialihkan kepada satker Auditorat Utama Investigasi (AUI) di Kantor Pusat. Sehingga fungsi perwakilan hanya berkoordinasi dengan pihak pemohon dhi. IPH dengan pihak AUI. Untuk output LHP PKN maupun LHP PI

merupakan output dari AUI. Selama Tahun 2020 belum ada permintaan pemeriksaan dari pihak lain selain dari pihak IPH.

Meskipun capaian IKU 5 pada tahun 2020 adalah 100%, walaupun tidak ada penyampaian LHP sesuai permintaan stakeholder selama kurun waktu 2020, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan capaian IKU 5 atau sebelumnya IKU 1.3 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 5 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100

Perbandingan realisasi IKU 5 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan koordinasi terkait IKU 5, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp167.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.464.744,00 atau 99,06%.

6. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang

menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 100% dengan skor 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2020 di Semester II, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ikut terlibat dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu 3 (tiga) Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan 1 (satu) Pemeriksaan Kepatuhan Atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- c. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- d. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Perkembangan capaian IKU 6 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU 6 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100% dan 100

Perbandingan realisasi IKU 6 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 6, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp1.266.027.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.082.080.375,00 atau 85,47%.

7. IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

IKU ini merupakan IKU yang sebelumnya tidak ada di PK 2016 dan PK 2017, baru ditetapkan pada PK 2018 serta belum masuk dalam Renstra BPK dan Renstra BPK Perwakilan Tahun 2016 – 2020.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2020 adalah 4,61 dengan skor 92,20. Capaian ini sedikit menurun jika dibandingkan capaian pada Tahun 2019 sebesar 4,78, dengan skor 95,60. Namun demikian, capaian Tahun 2020 inipun juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,00.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai atas visi, misi dan nilai dasar BPK. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPK melalui pengarahannya Kepala Perwakilan dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungan kerja dan Pengarahannya Kepala Perwakilan kepada Para Pemeriksa sebelum berangkat pemeriksaan lapangan. Selain itu juga dengan TV Informasi yang berada di lobi dan di Kafe Mandiri Kantor Perwakilan.

Perkembangan capaian IKU 7 atau sebelumnya IK 3.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU 7 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	N/A	N/A	4,47 dan 89,4	4,78 dan 95,60	4,61 dan 92,20

Perbandingan realisasi tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, IKU ini baru ada di tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingkan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	N/A	N/A	4,47	4,78	4,61

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 7, pada Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK sebesar Rp218.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp217.678.820,00 atau 99,47%.

8. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 380/ND/XI/09/2020, tanggal 14 September 2020 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 89,09 atau dengan kategori "A" (Memuaskan) dengan skor 103,59. Capaian ini walaupun melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,00 atau di kategori "A", namun jika diperbandingkan dengan capaian Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 91,03 atau dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 8 atau sebelumnya IK 3.2.1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKU 8 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	AA	A	A dan 100	A dan 100	BB dan 88,89	AA dan 100	A dan 103,59

Perbandingan realisasi IKU 8 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	A	A	BB	AA	A

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 8, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp213.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp213.033.052,00 atau 99,65%.

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2020 adalah 99,10% dengan skor 104,32. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 98,92% dengan skor 104,13.

Perkembangan capaian IKU 9 atau sebelumnya IK 3.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU 9 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	80%	95%	95%	79,36 % dan 79,36	75,69 % dan 94,61	82,68 % dan 103,36	98,92 % dan 104,13	99,10 % dan 104,32

Target IKU 9 pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa hal yang kurang yaitu pemanfaatan portal e-Audit belum maksimal walaupun sudah digunakan oleh pemeriksa, hal tersebut dikarenakan pemeriksa hanya akan mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest dari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SMP, SiAP dan SIPTL sudah mencapai 100% dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Demikian pula pemanfaatan portal, e-mail, e-drive dan SISDM sudah mulai diperhatikan dan banyak dipergunakan oleh Pegawai, terutama pemanfaatan aplikasi SISDM untuk melihat data kehadiran pegawai.

Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2020 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.12 Tingkat Pemanfaatan TI Tahun 2020

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan				Aplikasi Manajemen Pengetahuan (5%)
e-mail (15%)	e-drive (10%)	Portal (5%)	SISDM (25%)	SMP (15%)	SiAP (10%)	SiPTL (15%)	Big Data Analytic	
100,00%	100,00%	100,00%	96,40%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%
100,00%			96,40%	100,00%				100,00%

Perbandingan realisasi IKU 9 atau sebelumnya IK 3.2.2 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	80%	95%	95%	79,36 %	75,69 %	82,68 %	98,92 %	79,36 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 9, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.529.700,00 atau 99,67%.

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

IKU ini merupakan IKU baru yang menggabungkan antara IKU *Best Practice* yang disusun, dan IKU Penerapan *Best Practice* serta ditambah dengan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang ketiga kegiatan tersebut dilakukan oleh Satker dalam kurun waktu satu tahun.

Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penerapan manajemen pengetahuan, dengan melakukan replikasi atas salah satu *best practice*, mengusulkan satu *best practice* dan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. 324/ND/XVIII.BDG/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yaitu replikasi atas “Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan”, yang merupakan *best practice* dari BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. *Best practice* ini diterapkan untuk memaksimalkan fungsi Subbagian Humas dan TU sehingga berita informasi dari media lokal dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, dan implementasinya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menjadi “Layanan Pojok Berita Media pada Website BPK Perwakilan”.
- b. Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. 388/ND/XVIII.BDG/11/2020 tanggal 30 November 2020, menyampaikan 2 (dua) kegiatan atau aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020, yaitu:
 - 1) Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar pada tanggal 20 s.d. 23 Januari 2020 di Kantor Perwakilan;
 - 2) Diseminasi Panduan Pemeriksaan Kepatuhan Covid-19 secara online, dengan narasumber dari Direktorat Revbang.
- c. Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. 416/ND/XVIII.BDG/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan No. 5/ND/XVIII.BDG/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 (Perbaikan), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan mengusulkan *best practice* yaitu “Penyelenggaraan Kegiatan *Talk Show* BPK Jabar melalui TV/Radio”.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK No. 30/ND/XII.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Hasil Penilaian Usulan *Best Practice*, dapat dipertimbangkan sebagai *Innovative Practice*. Usulan tersebut diakui sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2020.

Pencapaian IKU baru ini di Tahun 2020, adalah 125% dengan skor 105. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan capaian IKU 10 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU 10 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	125% dan 105

Perbandingan realisasi IKU 10 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	125%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 10, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp199.202.000,00 dengan realisasi sebesar Rp197.255.110,00 atau 99,02%.

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, pencapaian IKU ini adalah 3,59 (memuaskan) dengan skor 94,47. Capaian ini sesuai kurang dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3,80 (memuaskan). Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survei oleh pihak ketiga/surveyor. Oleh karenanya hasil survei tersebut merupakan penilaian yang independen. Berdasarkan hasil survei tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat perlu lebih aktif untuk meningkatkan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat baik melalui saluran Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Perwakilan, Kehumasan melalui website maupun melalui WAG dengan humas pemda maupun wartawan media massa.

Perkembangan capaian IKU 11 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU 11 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	3,80	-	-	-	-	3,59 dan 94,47

Perbandingan realisasi IKU 11 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	125%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 11, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp199.202.000,00 dengan realisasi sebesar Rp197.255.110,00 atau 99,02%.

12. IKU 12 – Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun
- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Untuk tahun 2020, realisasi IKU 12 adalah sebesar 97,77% dengan skor kinerja 97,77. Nilai IKU ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, walaupun sudah lebih baik dari capaian tahun 2019 yang hanya sebesar 92,80% untuk jam pelatihan pemeriksa dan 95% untuk jam pelatihan pegawai non pemeriksa. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan serta beberapa keadaan yang terjadi Tahun 2020 khususnya kondisi pandemi Covid-19.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya jam diklat pemeriksa dengan menyelenggarakan diklat teknis yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu: Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar untuk para pemeriksa yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Januari 2020 dan Diklat Self Motivation Skill untuk pegawai non pemeriksa. Diklat teknis ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan dan hanya dapat dilaksanakan masing-masing 1 (satu) kali untuk pemeriksa dan pegawai non pemeriksa, oleh karena keterbatasan anggaran Badiklat.

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2020, target 100% untuk pegawai yang memenuhi jam diklat tidak tercapai, dari 125 orang pemeriksa, hanya 116 orang pemeriksa yang memenuhi target 40 JP. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU 12 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IKU 12 - Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	85,45 % dan 85,45	88,52 % dan 88,52	89,26 % dan 89,26	92,80 % dan 92,80	97,77% dan 97,77
		90%	90%	100%	100%	100%	62,90 % dan 69,89	87,27 % dan 96,97	100% dan 100	95% dan 95	

Perbandingan realisasi IKU 12 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	85,45%	88,52%	89,26%	92,80%	97,77%
	90%	90%	100%	100%	100%	62,90%	87,27%	100%	95%	

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 12, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-8) sebesar Rp191.312.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.472.857,00 atau 98,52%.

13. IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu: a. Penyerapan anggaran; b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; c. Pencapaian keluaran; dan d. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2020 mencapai 88,22% dengan skor 101,40 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 87%. Adapun capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut berdasarkan Hasil Penilaian dari Biro Keuangan, sebagai berikut:

Penilaian Biro Keuangan atas IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran		
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)	Nilai Aspek Implementasi
87,82%	88,83%	88,22%

Jika dibandingkan untuk capaian nilai Aspek Kinerja Anggaran selama kurun waktu lima tahun, sebagai berikut:

Perbandingan Nilai Aspek Implementasi Anggaran					
Tahun	Penyerapan Anggaran	Pencapaian Keluaran	Konsistensi	Efisiensi	Nilai Implementasi
2020	87,82%		88,83%		88,22%
2019	95,10%	100%	99,58%	62,24%	88,65%
2018	95,43%	99,49%	70,20%	61%	82,76%
2017	91,31%	99,39%	86,68%	64,81%	86,40%
2016	93,03%	100%	80,92%	67,73%	91,40%

Perkembangan capaian IKU 13 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 13 – Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
13	Tingkat Kinerja Anggaran	80%	82%	85%	80%	87%	91,40% dan 105	86,40% dan 105	82,76% dan 97,36	88,65% dan 105	88,22% dan 101,40

Berdasarkan Tabel 3.16 di atas, capaian IKU 13 tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dan lebih naik dibandingkan tahun 2018. Peningkatan ini terjadi pada empat indikator, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 95,10% (sedikit menurun dibandingkan tahun 2019, namun naik jika dibandingkan tahun 2018), tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi yang mencapai 99,58%, tingkat pencapaian keluaran yang mencapai 100%, dan tingkat efisiensi yang mencapai 62,24% (menurun dibandingkan tahun 2019, namun naik jika dibandingkan tahun 2018). Penurunan capaian atas IKU 13 dikarenakan kenaikan target Tahun 2020 dengan target 87%, sedangkan target Tahun 2019 sebesar 80%.

Adapun Tingkat Penyerapan Anggaran berdasarkan jenis layanan, sebagai berikut:

Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran berdasarkan Layanan

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Revisi ke-8 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	20.255.628.000,00	19.993.958.000,00	18.365.471.698,00	91,86
	Sekretariat Perwakilan	1.408.776.000,00	1.374.581.000,00	1.365.141.008,00	99,31
	Sarana dan Prasarana Internal	1.193.538.000,00	1.504.443.000,00	1.503.303.200,00	99,92
	Perkantoran	18.660.249.000,00	17.898.622.000,00	17.716.871.178,00	98,98
	Total DIPA 2020	41.518.191.000,00	40.771.604.000,00	38.950.787.084,00	95,46

Sedangkan perbandingan realisasi IKU 13 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kinerja Anggaran	80%	82%	85%	85%	87%	91,40%	86,40%	82,76%	88,65%	88,22%

Walaupun realisasi atas target IKU 13 ini telah melebihi target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap akan melakukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target tahun 2020 yang lebih baik, Upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2020, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
- b. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
- c. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan
- d. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 13 pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp213.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp213.033.052,00 atau 99,65%.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi DIPA

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Realisasi DIPA Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/Keluaran/SubKeluaran	Output Keluaran (volume)			Anggaran (Rp)		%
	Target	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	
1 LHP BPK Perwakilan Jawa Barat	370	370	LHP	16.761.457.000,00	15.701.104.842,00	93,67%
a. LHP Keuangan	26	26	LHP	4.759.377.000,00	4.576.782.342,00	96,16%
b. LHP Kinerja	5	5	LHP	955.629.000,00	786.279.338,00	82,28%
c. LHP DTT	17	17	LHP	3.576.238.000,00	3.389.485.700,00	94,78%
d. LHP DTT Banpol	268	268	LHP	505.523.000,00	496.997.416,00	98,31%
e. LHP Pendahuluan/Interim	54	54	LHP	6.964.690.000,00	6.451.560.046,00	92,63%
2 LHP KAP untuk dan atas nama BPK	3	3	LHP	1.122.879.000,00	1.010.530.645,00	89,99%
3 Laporan Pemantauan BPK	112	112	LHP	1.478.332.000,00	1.025.651.858,00	69,38%
a. Kerugian Daerah	56	56	LHP	1.123.109.000,00	826.088.678,00	73,55%
b. TLRHP	56	56	LHP	355.223.000,00	199.563.180,00	56,18%
4 Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Rumusan Bahan	3.959.000,00	3.732.600,00	94,28%
5 Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	547.377.000,00	545.523.731,00	99,66%
6 Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan IHPS	70.740.000,00	70.252.600,00	99,31%
7 Laporan Profil Entitas	2	2	Laporan	9.214.000,00	8.675.422,00	94,15%
8 Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20	Laporan	1.374.581.000,00	1.365.141.008,00	99,31%
a. Layanan Hukum Perwakilan	4	4	Laporan	167.028.000,00	165.464.744,00	99,06%
b. Layanan Kehumasan dan TU Perwakilan	4	4	Laporan	418.044.000,00	414.933.930,00	99,26%
c. Layanan SDM Perwakilan	4	4	Laporan	386.598.000,00	383.568.763,00	99,22%
d. Layanan Keuangan Perwakilan	4	4	Laporan	213.787.000,00	213.033.052,00	99,65%
e. Layanan Umum Perwakilan	4	4	Laporan	189.124.000,00	188.140.519,00	99,48%
9 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	Laporan	1.504.443.000,00	1.503.303.200,00	99,92%
10 Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	17.898.622.000,00	17.716.871.178,00	98,98%
Total	535	535		40.771.604.000,00	38.950.787.084,00	95,53%

Dari alokasi anggaran tersebut, pada revisi ke-8 maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp38.950.787.084,00 atau 95,53% dari anggaran. Persentase penyerapan anggaran ini lebih rendah dibandingkan dengan persentase penyerapan tahun 2019, yaitu sebesar 96,71%.

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Realisasi Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	77,68%	17.884.336.000,00	16.711.635.487,00	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	17.884.336.000,00	16.711.635.487,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,62%	355.223.000,00	199.563.180,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	1.227.422.000,00	1.152.558.863,00	Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci Kinerja dan PDTT Penanganan Pandemi Covid-19
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	167.028.000,00	165.464.744,00	Layanan Bidang Hukum
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	1.266.027.000,00	1.082.080.375,00	Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci Kinerja dan PDTT
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,61	218.842.000,00	217.678.820,00	Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pimpinan

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	89,09	213.787.000,00	213.033.052,00	Layanan Bidang Keuangan
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,10%	24.610.000,00	24.529.700,00	Layanan bidang Umum dan TI
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125,00%	199.202.000,00	197.255.110,00	Layanan bidang Kehumasan
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,59	199.202.000,00	197.255.110,00	Layanan bidang Kehumasan
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,77%	191.312.000,00	188.472.857,00	Anggaran Layanan SDM, yaitu Pengembangan Kompetensi dan penilaian Kinerja Pegawai, sedangkan anggaran pelaksanaan diklat berasal dari Badan Diklat
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	88,22%	213.787.000,00	213.033.052,00	Layanan Bidang Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2020 adalah 98,66, dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yaitu: Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; Hasil Evaluasi AKIP; Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; dan Tingkat Kinerja Anggaran.

Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 4 (empat) IKU yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
4. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2020 yang menunjukkan kecenderungan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Realisasi Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP, sampai dengan Triwulan IV atau Semester II 2020 belum mencapai target 100%, walaupun pemenuhan QC dan QA sudah sebesar 100% untuk setiap kegiatan pemeriksaan, namun berdasarkan evaluasi Dit EPP untuk tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP yang diterbitkan masih banyak catatan, khususnya atas LHP LKPD TA 2019. Ke depannya kan lebih meningkatkan QC maupun QA khususnya dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, sehingga tidak terjadi lagi tingkat keakuratan dan tingkat konsistensi yang masih menjadi catatan.

2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Dit. PSMK melalui surveyor (pihak ketiga), masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai di BPK Perwakilan mengenai Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK. Selain itu dalam implementasinya dilapangan, masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh pegawai, karena penilaian tersebut adalah berdasarkan hasil survei kepada pihak eksternal. Ke depannya akan lebih banyak disampaikan pada saat pengarahan Pimpinan dan atau Kepala Perwakilan kepada pegawai khususnya pada saat persiapan pelaksanaan pemeriksaan dan dalam rapat-rapat internal.
3. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survei oleh pihak ketiga/surveyor. masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karenanya hasil survei tersebut merupakan penilaian yang independen. Berdasarkan hasil survei tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat perlu lebih aktif untuk meningkatkan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat baik melalui saluran Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Perwakilan, Kehumasan melalui website maupun melalui WAG dengan humas pemda maupun wartawan media massa.
4. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan ataupun tugas kesekretariatan yang harus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatan yang tidak tepat dengan agenda kegiatan di perwakilan, selain itu sering kali jadwal diklat untuk pemeriksa yang ditawarkan pada semester I maupun pada semester II juga bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di lapangan. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah berupaya agar semua pemeriksa dapat memenuhi jam diklat dengan menyelenggarakan 1 (satu) diklat teknis pemeriksaan di Perwakilan, yaitu 1 (satu) diklat pada semester I, namun hal tersebut ternyata belum dapat memenuhi target untuk seluruh pemeriksa 40 JP. Demikian pula untuk diklat bagi pegawai non pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah berupaya dengan menyelenggarakan 1 (satu) diklat teknis bagi pegawai non pemeriksa yang dilaksanakan pada semester II di Perwakilan.

Pemeriksa maupun pegawai non pemeriksa yang belum mencukupi jam diklatnya pada saat pelaksanaan diklat di perwakilan, yang bersangkutan disaat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas pemeriksaan ataupun tugas lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang akan melakukan beberapa upaya untuk lebih meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat					98,66
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	77,68%	77,68
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,62%	100,83
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	100,75
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,61	92,20
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	89,09	103,59
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,10%	104,32
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125,00%	105
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,59	94,47
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,77%	97,77
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	88,22%	101,40

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020

: Rp41.518.191.000,00

Revisi Anggaran (Revisi ke-8)

: Rp40.771.604.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

: Rp38.950.787.084,00

**Realisasi Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran yang mendukung
Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	77,68%	17.884.336.000,00	16.711.635.487,00	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	17.884.336.000,00	16.711.635.487,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,62%	355.223.000,00	199.563.180,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	1.227.422.000,00	1.152.558.863,00	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	167.028.000,00	165.464.744,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	1.266.027.000,00	1.082.080.375,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,61	218.842.000,00	217.678.820,00	
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	89,09	213.787.000,00	213.033.052,00	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,10%	24.610.000,00	24.529.700,00	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125,00%	199.202.000,00	197.255.110,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,59	199.202.000,00	197.255.110,00	

Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,77%	191.312.000,00	188.472.857,00	
13	Tingkat Anggaran Kinerja	87%	88,22%	213.787.000,00	213.033.052,00	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

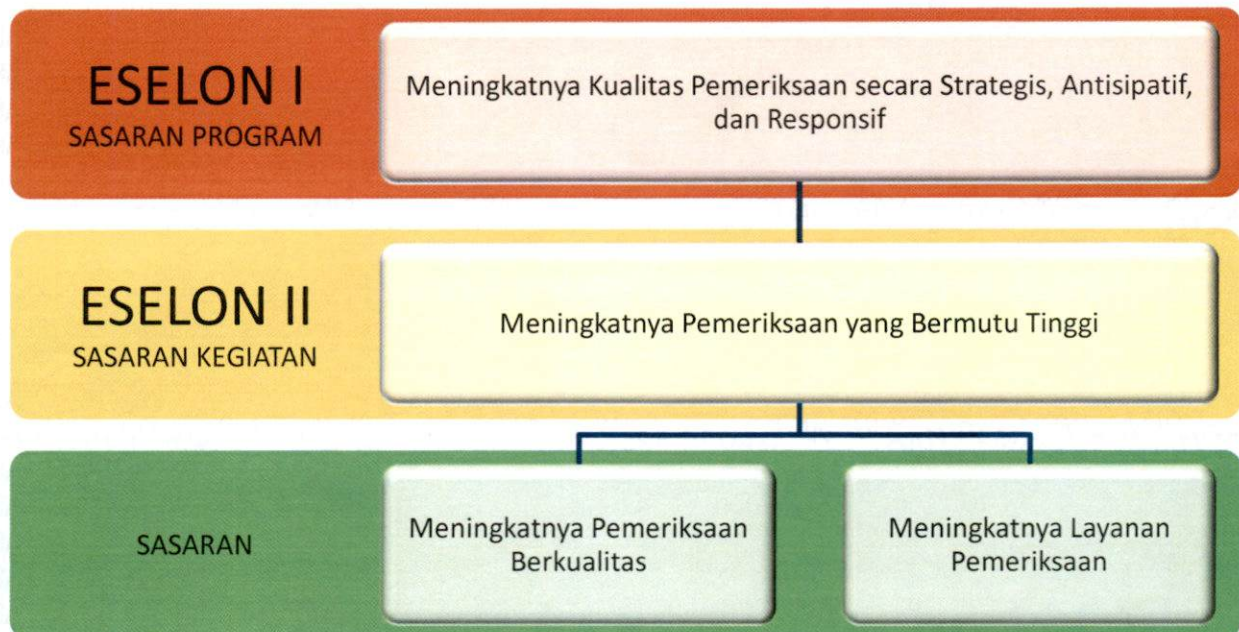
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp41.518.191.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp20.255.628.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp21.262.563.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

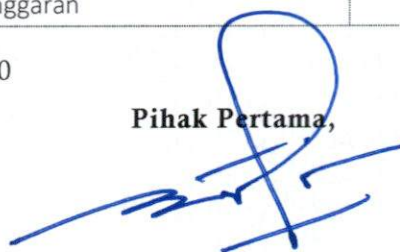
Jakarta, 6 April 2020

Pihak Kedua,



Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA

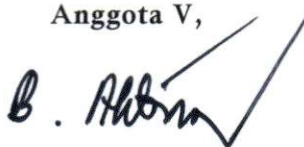
Pihak Pertama,



Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota V,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Wakil Ketua,



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA

Ketua,



Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
			Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (keluaran/subkeluaran)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST, POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung Eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)
Indeks Kepuasan Layanan	Skala 1-5 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan 3,00 - 3,99 = memuaskan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan	

Jakarta, 6 April 2020

Pihak Kedua,



Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA

Pihak Pertama



Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA